

# SEKILAS MEDIA

Kompas

Kamis, 9 Desember 2010

## "5 Pemda Diperingatkan : Kerugian Negara Paling Banyak dalam Pekerjaan Umum"

Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PAP DPD RI) secara khusus menyoroti lima daerah di Provinsi Sumatera Utara karena banyaknya kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tahun anggaran 2008 dan 2009 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, jumlah potensi kerugian negara di lima daerah tersebut mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Waspada

Senin, 13 Desember 2010

## "BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Rp 1,2 Triliun di Pemprov Sumut"

Hasil temuan audit BPK di Pemprov Sumut tahun anggaran 2008-2009, indikasi kerugian negara mencapai Rp 1,2 Triliun. Dinas PU Bina Marga Sumut merupakan satu dari sekian banyak SKPD yang terbanyak berpotensi merugikan negara.

Harian Analisa

Selasa, 14 Desember 2010

## "Pemko Medan Siapkan Tim Pengawas Tindak Lanjuti Temuan BPK RI"

Pemko Medan menyiapkan Tim Pengawas menindaklanjuti temuan BPK RI dalam pengelolaan APBD 2008 – 2009. Semua laporan audit BPK RI itu satu-persatu diperiksa oleh pihaknya dan sebagai tindak lanjut pemanggilan SKPD bersangkutan juga dilakukan. Hasil pemeriksaan nantinya juga akan diserahkan lagi ke BPK RI untuk mengkonfirmasi permasalahan temuan yang sudah ditindaklanjuti Pemko.

Sinar Indonesia Baru

Rabu, 15 Desember 2010

## "DPRDSU Desak BPK dan KPK Audit Penyaluran Bantuan Letusan Gunung Sinabung Karo"

Komisi E DPRD Sumut mendesak BPK dan KPK segera turun tangan mengaudit penyaluran dana bantuan korban letusan Gunung Sinabung Kabupaten Karo karena penyalurannya sangat tidak profesional serta tidak transparan. Dari total Rp 5,3 miliar bantuan yang diterima, hanya Rp 2 miliar yang tersalurkan, sisanya Rp 3 miliar terancam dikembalikan ke Pemerintah Pusat.



## REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj.Sri Madonna (sm), Hj.Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon),

Ermila Oecthari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra),

Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan

Telp. 061-4519039 ext. 321

Tahun Ketiga  
Edisi Desember 2010

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



## DARI REDAKSI

### REFLEKSI AKHIR TAHUN

S sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2010 dan memasuki tahun baru 2011. Banyak peristiwa telah terjadi dalam kurun waktu satu tahun ini. Di bidang pemeriksaan, hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2009 yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa belum ada satu pun entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pemeriksaan (WTP). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI juga telah menandatangani kesepakatan bersama dengan 34 DPRD di wilayah Provinsi Sumatera Utara tentang tata cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Di tahun 2011 nanti, BPK RI akan memasuki usia 64 tahun. Di usia yang semakin bertambah, BPK RI pun semakin banyak melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Salah satu sistem yang sedang dikembangkan oleh BPK saat ini adalah pusat data BPK yang akan memungkinkan para pemeriksa BPK melakukan *e-audit*. *E-audit* ini diharapkan dapat mempersingkat waktu pemeriksaan sehingga penyerahan LHP BPK pun dapat dilakukan tepat waktu dengan tetap menjaga kredibilitas hasil pemeriksaan.

Menyongsong tahun baru ini, semangat harus terus diperbarui. Kinerja pun harus ditingkatkan seiring dengan semakin banyaknya tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. (mt)

Selamat Natal 2010 dan Selamat Tahun Baru 2011

### Daftar Isi...

#### Hal.1

- Dari Redaksi
- Tatap Muka Ketua BPK RI dengan Pegawai BPK RI Pwk Provinsi Sumut

#### Hal.2

- Balai Diklat Medan Selesai Dibangun

#### Hal.4

- Opini LKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 dan 2008

#### Hal.5

- Kenali Entitas : Kabupaten Karo
- Upgrade Your Mind : Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember

#### Hal.6

- Kuil Shri Mariamman

#### Hal.7

- Kaleidoskop 2010

#### Hal. 8

- Sekilas Media

## TATAP MUKA KETUA BPK RI DENGAN PEGAWAI BPK RI PWK PROVINSI SUMUT



Ketua BPK RI, drs. Hadi Poernomo, Ak., mengadakan kunjungan kerja sekaligus tatap muka dengan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 15 Desember 2010. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Turut hadir pula dalam kegiatan ini Anggota I BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, dan Tortama V BPK RI, Achmad Sjakir Amir, serta beberapa staf ahli dan kepala subbagian dari kantor pusat BPK RI.

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, drs. Oodj Huziat sekaligus memperkenalkan para pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan umum dari Ketua BPK RI tentang BPK RI masa kini yang sedang mengembangkan konsep **BPK Sinergi**, yang salah satunya menerangkan tentang konsep *e-audit*.

.....bersambung ke halaman 3

## BALAI DIKLAT MEDAN SELESAI DIBANGUN

Balai Diklat BPK RI di Medan telah selesai dibangun. Bangunan yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting Km 10,5 Medan ini akan siap digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2011. Sebelumnya, Balai Diklat BPK RI di Medan berlokasi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan.

Balai Diklat ini akan dipimpin oleh seorang pejabat eselon tiga selaku Kepala Balai dan dibantu oleh dua orang kepala subbagian, yaitu Subbagian Pelaksanaan

Diklat dan Subbagian Sekretariat Balai Diklat. Jumlah seluruh staf di Balai Diklat ini adalah sembilan orang.

Balai Diklat ini dilengkapi dengan fasilitas wisma yang menyediakan 72 kamar bagi peserta diklat. Dalam perkembangannya, Balai Diklat ini nantinya tidak hanya akan digunakan oleh internal pegawai BPK RI saja tetapi juga oleh pihak eksternal, seperti kegiatan sertifikasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diklat-diklat inspektorat dan lain-lain. (dkr)



*Proses pembangunan Balai Diklat BPK RI di Medan*



*Balai Diklat BPK RI di Medan yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.*



*Salah satu fasilitas ruang kelas Balai Diklat BPK RI di Medan yang masih dalam tahap persiapan*



## KALEIDOSKOP 2010

Kegiatan di BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Utara

*Peringatan HUT BPK RI ke-63 (Januari)*



*Diseminasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 (26 - 28 Januari, 29 Maret, 27 September, 8 - 10 November)*



*Welcome To BPK : Siswa-siswi SMU se-Kota Medan Mengenal Lebih Dekat BPK (30 Juli)*



*Welcome To BPK : Mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi se-Kota Medan Mengenal Lebih Dekat BPK (2 Agustus)*



*Sosialisasi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (11 -12 November, 6 Desember)*



*Workshop Pemeriksaan Kinerja Tingkat Eksekutif Angkatan II (18 - 19 November)*

*Tatap Muka Ketua BPK RI dengan Pegawai BPK RI Pwk Provinsi Sumut (15 Desember)*



*Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan (8 April)*



*Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD se-Wilayah Provinsi Sumatera Utara (19 Oktober)*



## -- KUJL SHRI MARIAMMAN --

Kuil Shri Mariamman merupakan kuil Hindu tertua di Kota Medan. Kuil ini dibangun pada tahun 1881 M atau 4984 tahun saka oleh penduduk Tamil India yang tinggal di kota Medan untuk menghormati dan memuja Dewi Kali. Dalam mitologi India, Dewi Kali merupakan personifikasi Dewi Durga, istri Dewa Siwa. Dewi Kali dipercaya sebagai dewi penjaga dunia kegelapan, kematian dan kelahiran kembali. Ia juga dipercaya mampu menghilangkan rasa sakit, keputusan sekaligus merupakan bayangan rahasia kehidupan manusia.

Kuil ini terletak di kawasan Kampung Keling, atau yang juga dikenal dengan sebutan little India, Kecamatan Petisah, kota Medan. Arsitektur bangunan kuil ini sangat kental nuansa budaya India. Salah satunya adalah hiasan goparum (gapura) berwarna hijau yang ada di pintu gerbang kuil. Di atas pintu gerbang tersebut terdapat tulisan "*Perhimpunan Shri Mariamman Medan, Shri Mariamman Kuil*" dan dua buah gambar malaikat yang membawa kalung bunga besar serta sebuah patung gajah yang merupakan hewan suci dalam kepercayaan Hindu. Tiang dan lantai kuil ini terbuat dari marmer dan dilapisi oleh karpet hijau dan pada langit-langit kuil tergantung hiasan lampu-lampu yang mewah.

Di dalam kuil tersebut terdapat tiga ruang utama tempat berdoa dan tiga kayu berwarna coklat yang berdiri tegak di atas semen persegi empat. Selain patung



Perayaan Thaipusam yang dilaksanakan di Kuil Shri Mariamman pada bulan kesepuluh kalender Tamil. Perayaan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Murugan atau Dewa Subramaniam



Kuil Shri Mariamman tampak dari depan

Dewi Kali, di sekeliling kuil tersebut terdapat pula gambar dan patung Dewa Ganesha, Wisnu, Siwa dan Dewi Aman.

Selain Kuil Shri Mariamman yang terletak di Kampung Keling, sebuah Kuil Shri Mariamman lain juga terdapat di sebelah selatan kota Medan dekat Sungai Sepit yang dibangun pada tahun 1876. Ritual yang rutin diadakan setiap tahun diantaranya adalah ritual Theemithi, yaitu ritual berjalan di atas api pada perayaan Thaipusam. Perayaan Thaipusam ini dirayakan oleh umat Hindu di seluruh dunia untuk menghormati Dewa Murugan atau yang dikenal juga dengan nama Dewa Subramaniam. Perayaan ini dirayakan pada bulan Thai, yaitu bulan kesepuluh dalam kalender Tamil.

Kuil Shri Mariamman juga terdapat di Singapura dan Malaysia. Kuil Shri Mariamman merupakan kuil tertua di kedua negara tersebut. Di Singapura, kuil tersebut dibangun pada tahun 1843 sedangkan di Malaysia dibangun pada tahun 1883.

Orang-orang India Tamil mulai datang dan menetap di kawasan ini sekitar abad ke-19, ketika Kesultanan Deli sedang dalam masa kemakmuran ekonomi akibat tembakau Deli yang laku keras di pasaran dunia. Dalam perkembangannya, kawasan ini tidak hanya dihuni oleh orang India Tamil tetapi juga oleh penduduk keturunan Tionghoa, Aceh, Jawa Batak dan Melayu. Sampai dengan tahun 1950-an, kawasan Kampung Keling masih dihuni oleh warga keturunan India dalam jumlah yang besar. Namun kemudian jumlah penduduk keturunan India di kawasan tersebut semakin berkurang karena keadaan ekonomi yang semakin sulit. Hal inilah yang membuat mereka harus pindah ke kawasan lain dan Kampung Keling pun akhirnya banyak dihuni oleh penduduk keturunan Tionghoa daripada India.

(dari berbagai sumber)



Salah satu interior Kuil Shri Mariamman

.....lanjutan hal. 1 : TATAP MUKA KETUA BPK RI DENGAN PEGAWAI BPK RI PWK PROVINSI SUMUT

Salah satu tantangan terbesar BPK saat ini adalah kurangnya jumlah pemeriksa apabila dibandingkan dengan jumlah entitas yang harus diperiksa dan waktu yang sangat terbatas. Sebagai contoh, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 34 entitas yang harus diperiksa sedangkan jumlah pemeriksanya hanya 130-an orang. Dengan batas waktu yang disediakan, banyak terjadi keterlambatan penyerahan hasil pemeriksaan akibat kurangnya sumber daya manusia. Salah satu cara yang dikembangkan oleh BPK untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan konsep *e-audit* dimana para pemeriksa dapat memperoleh data yang dibutuhkan dari entitas secara langsung melalui jaringan internet dan intranet. Diharapkan dengan adanya *e-audit* ini dapat mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini ditemui oleh para pemeriksa BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat diserahkan tepat waktu.

Konsep BPK Sinergi ini merupakan salah satu wujud nyata implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPK RI. Karena seperti kita ketahui, BPK RI merupakan salah satu dari tiga lembaga negara yang menjadi *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selain Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

Selain menjelaskan tentang konsep *e-audit*, Ketua BPK juga menjelaskan tentang etika birokrasi bagi pegawai BPK RI. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, hendaknya pegawai BPK RI menerapkan prinsip etika birokrasi yaitu meliputi kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Ketiga hal tersebut dilengkapi dengan rasa peduli yaitu selalu berperan lebih baik untuk kepentingan orang lain. Semua itu tentu saja harus dengan ijin Tuhan sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas negara yang diemban.

Pengarahan umum ini berjalan santai, Ketua BPK RI mendatangi langsung para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan mengajak berdialog secara terbuka. Para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera, baik staf maupun pejabat struktural, diberi kebebasan untuk melakukan tanya-jawab secara langsung dengan Ketua BPK berkaitan dengan pengarahan yang telah diberikan.

Setelah mengadakan tatap muka di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Ketua BPK dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan tatap muka dengan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan penandatanganan kesepakatan bersama dengan DPRD setempat. (dker)



## Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 dan 2008

No.	Pemerintah Daerah	Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran	
		2009	2008
1.	Provinsi Sumatera Utara	WDP	WDP
2.	Kota Medan	TMP	TMP
3.	Kabupaten Asahan	WDP	WDP
4.	Kabupaten Karo	WDP	WDP
5.	Kabupaten Serdang Bedagai	WDP	WDP
6.	Kabupaten Pakpak Bharat	WDP	WDP
7.	Kabupaten Humbang Hasundutan	WDP	WDP
8.	Kabupaten Tapanuli Utara	WDP	TMP
9.	Kota Padangsidimpuan	WDP	TMP
10.	Kabupaten Dairi	WDP	WDP
11.	Kota Tebing Tinggi	WDP	WDP
12.	Kabupaten Tapanuli Selatan	TW	TMP
13.	Kota Sibolga	WDP	WDP
14.	Kabupaten Samosir	WDP	WDP
15.	Kabupaten Langkat	TMP	TMP
16.	Kabupaten Mandailing Natal	WDP	TMP
17.	Kota Binjai	TW	WDP
18.	Kabupaten Simalungun	WDP	WDP
19.	Kabupaten Deli Serdang	TMP	TMP
20.	Kota Tanjungbalai	WDP	WDP
21.	Kabupaten Tapanuli Tengah	WDP	WDP
22.	Kabupaten Labuhanbatu	WDP	TMP
23.	Kabupaten Nias	TMP	TMP
24.	Kabupaten Toba Samosir	WDP	TMP
25.	Kabupaten Batubara	TMP	TMP
26.	Kota Pematangsiantar	TMP	TMP
27.	Kabupaten Nias Selatan	TMP	TMP

Keterangan : WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
TW : Tidak Wajar  
TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sampai dengan pemeriksaan LKPD 2009, belum ada satu pun pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada pemeriksaan LKPD 2010, ada tujuh kota/kabupaten baru hasil pemekaran yang akan menjadi objek pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Ketujuh kota/kabupaten tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.



## KABUPATEN KARO

*Kenali entitas*

Luas wilayah :

2.127,25 Km<sup>2</sup> atau 212.725 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 13kecamatan, 14 kelurahan dan 248 desa.

Batas wilayah : Utara : Kab. Langkat dan Kab. Deli Serdang  
Timur : Kab. Deli Serdang dan Kab.Simalungun  
Selatan : Kab. Dairi dan Kab. Samosir  
Barat : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Kabupaten Karo terletak di jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi antara 120 – 1420 m di atas permukaan laut. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini, yaitu gunung Sibayak dan gunung Sinabung, sehingga Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan gempa vulkanik. Kabupaten Karo terletak di jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi antara 120 – 1420 m di atas permukaan laut. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini, yaitu gunung Sibayak dan gunung Sinabung, sehingga Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan gempa vulkanik. Daerah tujuan wisata utama di Kabupaten Karo adalah Kota Berastagi. Daerah ini terletak di ketinggian sekitar 4.594 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh barisan gunung-gunung. Berastagi memiliki udara yang sejuk dan hamparan pertanian yang luas, indah dan hijau. Sebagai daerah tujuan wisata utama, Berastagi telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti hotel berbintang, restoran, lapangan golf dan lain-lain. Hasil alam utama daerah ini adalah buah markisa dan jeruk manis sehingga Berastagi pun dijuluki sebagai “Kota Markisa dan Jeruk Manis”.

Sumber : [www.karokab.go.id](http://www.karokab.go.id) & berbagai sumber



Kawasan Wisata Berastagi



Rumah Adat Khas Karo

**Upgrade  
your mind**

## PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI 9 DESEMBER

Hari Anti Korupsi Internasional pertama kali dicetuskan oleh PBB diperingati setiap tanggal 9 Desember dalam Konvensi Anti Korupsi di Merida, Meksiko melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 58/4 pada tahun 2003. Berawal dari sebuah keprihatinan bangsa-bangsa terhadap bahaya yang korupsi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan negara dan masyarakat serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan. Korupsi pun dianggap musuh bagi bangsa-bangsa.

Di Indonesia, pemerintah baru menetapkannya sebagai Hari Anti Korupsi Nasional tahun 2004 yang ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Desember 2004. Namun Hari Anti Korupsi baru diperingati secara massal di Indonesia pada tahun 2006 yang dirintis oleh Tiga Pilar Kemitraan (3PK) yang merupakan kemitraan tiga komponen yaitu penyelenggara negara, dunia swasta dan masyarakat. 3PK ini dideklarasikan pada tanggal 27 September 2002 oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kadin Indonesia dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Peringatan Hari Anti Korupsi yang pertama ini dilakukan dengan melibat-

kan sekitar 2500 massa dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dari tingkat TK sampai dengan SMA, dan dipusatkan di Tugu Proklamasi Jakarta. Tahun 2007, peringatan Hari Anti Korupsi semakin meluas dengan melibatkan lebih banyak unsur termasuk Kementerian dan BUMN. Peringatan Hari Anti Korupsi di Indonesia selalu identik dengan pelaksanaan unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tuntutan utamanya adalah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi. Perlu adanya peran aktif setiap komponen bangsa untuk menanggulangi korupsi di Indonesia.



Unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi di depan kantor BPK RI Pwk Prov. Sumut 9 Desember 2010

(dari berbagai sumber)